

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia adalah Negara agraris, sebanyak 40 persen penduduknya bergerak di bidang pertanian. Selain itu, Indonesia juga dilintasi pegunungan subur. Lahan pertanian subur di Indonesia karena letak negara Indonesia berada di kawasan iklim tropis yang membuat pelapukan batuan di Indonesia terjadi dengan sempurna dan membuat tanah menjadi subur (Ayun, Q., Kurniawan, S. dan Saputro, W.A., 2020)

Potensi Negara tersebut menjadikan Negara Indonesia menjadi Negara dengan potensi pertanian pangan tertinggi di dunia, hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018. Indonesia merupakan Negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia, dengan total produksi beras sebanyak 32,42 juta ton beras dan tingkat konsumsi sebanyak 29,57 ton beras per tahun (BPS, 2018) dan hal ini sangat mendukung menuju cita-cita Indonesia untuk menjadi lumbung padi dunia di tahun 2045 (Safitri dan Sihaloho, 2020).

Potensi yang sangat tinggi tersebut tidak diikuti dengan perkembangan sumberdaya pertanian yang proporsional. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah petani di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 3,18 persen dimana jumlah petani saat ini adalah 33,4 juta petani (Wajdah, 2021) Usaha yang dilakukan untuk tetap membuat sektor pertanian tetap ada serta terus meningkat adalah melalui pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian merupakan sebuah mekanisme yang direncanakan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, dalam konteks ini pembangunan pertanian digunakan untuk membuat pembangunan sistem dan usaha agribisnis ditekankan dalam memaksimalkan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif inilah yang menjadi nilai bagi Indonesia untuk bisa mensejahterakan rakyat secara berkelanjutan dan menjaga terhadap gejolak perekonomian Dunia (Husodo, 2004).

Pembangunan pertanian secara *holistic* mampu memberikan kontribusi secara nasional maupun lokal. Sektor pertanian menjadi

penyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) yang konsisten dan cenderung memiliki tren positif dari kurun 2019-2021. Dalam periode ini Lapangan usaha pertanian atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp2,25 kuadriliun sepanjang 2021. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 13,28 persen terhadap PDB Nasional. Jika diukur menurut PDB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, sektor pertanian sepanjang tahun 2021 hanya tumbuh 1,84 persen dibanding tahun sebelumnya. Meskipun lebih tinggi dibanding capaian pada 2020, pertumbuhan sektor pertanian pada 2021 masih lebih rendah dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Covid-19, di mana pertumbuhannya selalu di atas 3 persen (BPS, 2021).

Pertanian merupakan sektor yang menggerakkan ekonomi pedesaan, hal ini tercermin dari data ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa dari seluruh tenaga kerja yang bekerja di pedesaan pada tahun 2021 adalah sebanyak 1,86 juta yakni 29,86 persen dari total angkatan kerja di tahun 2021 (Abidin, 2021). Selanjutnya pembangunan ekonomi secara keseluruhan dapat diturunkan secara rinci dalam bentuk pembangunan pertanian. Secara umum pertanian memberikan sumbangsih kepada seluruh aspek ekonomi dan mencakup masyarakat pertanian. Untuk mendukung pembangunan pertanian terlaksana maka pengetahuan serta keterampilan petani perlu ditingkatkan. Pada dasarnya petani terus menerus mendapat metode baru, yang membuat cara berpikir petani pun berubah, petani saat ini mengembangkan sikap yang baru terhadap pertanian, alam sekitar bahkan terhadap diri petani sendiri (Mosher, 1996)

Bentuk nyata dari pembangunan pertanian adalah kebijakan pertanian, salah satu kebijakan untuk meningkatkan sektor pertanian agar tetap hidup adalah melalui pembentukan kelompok- kelompok tani yang diatur dalam peraturan menteri pertanian No.273/kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani disebutkan bahwa kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal pedesaan yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani. Kelompok tani berfungsi sebagai: a).Kelas belajar mengajar yaitu kelompok tani merupakan wadah bagi setiap anggotanya untuk berinteraksi dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan usaha dalam berusahatani yang lebih baik dan menguntungkan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. b).Wahana kerjasama yaitu kelompok tani merupakan

wadah untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani. c). Unit produksi yaitu kelompok tani merupakan satu kesatuan unit usahatani yang merupakan sekumpulan unit usaha para anggotanya untuk membentuk skala usaha yang efisien dan ekonomis (Deptan, 2007).

Jumlah kelompok tani di Indonesia mencapai 615.575 kelompok pada tahun 2019. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 4,57 persen untuk Kelompok Tani (Wajdah, 2021). Kelompok tani mampu secara nyata mengadakan fungsi sebagai wadah terpeliharanya dan berkembangnya pengertian, pengetahuan dan keterampilan sertakegotongroyongan berusahatani para anggotanya, melalui semangat gotong royong maka kelompok tani dapat melakukan pengelolaan lahan secara efektif dan efisien sehingga nantinya dapat dihasilkan pengolahan hasil secara bersama agar terwujud kualitas yang baik, seragam kemudian mengusahakan pula pemasarannya agar terwujud harga yang baik dan seragam. (Astuti, 2010).

Kelompok tani yang efektif diperlukan agar anggota kelompok dapat memperoleh manfaat dari keikutsertaanya, Efektivitas adalah ukuran seberapa baik suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Jika pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan maka dapat dikatakan efektif. Kelompok berjalan dengan lancar dan efektif sehingga tujuan kelompok tersebut telah dicapai. Dampak yang diharapkan dari tercapainya tujuan adalah kegiatan tersebut memiliki nilai lebih untuk menimbulkan kepuasan, sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok tersebut berjalan dengan efektif. Efektivitas merupakan hubungan dengan output dan tujuan, jika semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif kelompok tersebut (Annas, 2017).

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kelompok tani sebanyak 48.423 kelompok yang berada di berbagai kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat Kota Tasikmalaya juga membentuk kelompok tani dengan tujuan untuk mempertahankan produksi pertanian, wahana belajar serta wahana kerja sama untuk memperkuat kelembagaan pertanian serta meningkatkan semangat Bertani (DKP3 Kota Tasikmalaya, 2022).

Tabel 1. Jumlah Kelompok Tani Perkecamatan Di Kota Tasikmalaya Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani
1	Tamansari	197
2	Kawalu	177
3	Cibeureum	130
4	Bungursari	129
5	Mangkubumi	121
6	Purbaratu	114
7	Indihiang	97
8	Cipedes	59
9	Cihideung	29
10	Tawang	29

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertaian dan Perikanan Kota Tasikmalaya (2020)

Tercatat ada 1.082 kelompok tani yang tercatat secara resmi di Kota Tasikmalaya. Kelompok tani tersebut kemudian di bagi lagi menurut kelas-kelas tertentu Menurut Permentan Nomor 82 Tahun 2013 tentang kelompok tani dan gabungan kelompok tani mengungkapkan bahwa klasifikasi kemampuan kelompok tani dibagi ke dalam empat kategori yaitu: kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan kelas utama. Keempat kelas ini menunjukkan kemampuan yang dimiliki para petani tergolong kepada tingkatan kelas tersebut. Artinya tingkat keberdayaan yang dimiliki atas kegiatan pemberdayaan yang diberikan akan memberikan dampak terhadap tingkat kemampuan yang dimiliki anggota kelompok tani Sejalan dengan penguatan kapasitas ketahanan pangan di Kota Tasikmalaya, adanya kelompok tani ini diharapkan mampu menjadi penguat sektor pertanian, terkhusus pada tanaman pangan pokok (padi) sehingga produktivitasnya terus meningkat. Data produktivitas padi dapat dilihat secara rinci dalam (Gambar 1).

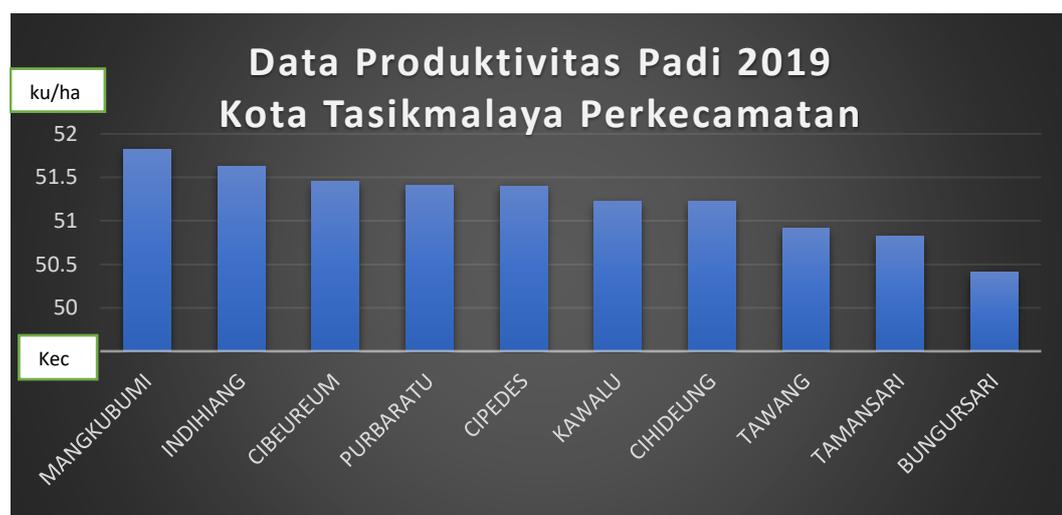


Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat (2021)

Gambar 1. Data produktivitas padi Kota Tasikmalaya 2015-2020

Idealnya kelompok tani mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produktivitas padi, sesuai dengan tujuan serta peran kelompok tani. Kelompok tani yang efektif mampu memberikan sumbangsih yang optimal terhadap peningkatan produksi padi.

Produktivitas padi di Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2018, bahkan pada tahun 2017-2018 produktivitas padi di Kota Tasikmalaya cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2019-2020 terdapat *trend positive* dengan peningkatan produktivitas sebanyak 12,95 persen dibandingkan dengan produktivitas pada tahun 2018 (Gambar 2).



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya,2019

Gambar 2. Data produktivitas padi di Seluruh Kecamatan Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya terdiri dari 10 Kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Cibeureum yang memiliki produktivitas tertinggi ke tiga di Kota Tasikmalaya yakni 5,14 ton/ha (BPS kota Tasikmalaya, 2019). Produktivitas Kecamatan Cibeureum berada di atas produktivitas rata-rata kota Tasikmalaya yakni 5,12 ton/ha (BPS Kota Tasikmalaya, 2019).

Efektivitas kelompok tani di Kecamatan Cibeureum sebagai kelembagaan di bidang pertanian idealnya mendorong pada peningkatan aktivitas kelompok tani khususnya dalam peningkatan produktivitas padi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat Hubungan Efektivitas kelompok tani terhadap produktivitas padi di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat efektivitas kelompok tani?
- 2) Bagaimana tingkat produktivitas padi pada kelompok tani ?
- 3) Apakah terdapat hubungan antara efektivitas kelompok tani secara simultan dan parsial dengan produktivitas padi pada kelompok tani ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis tingkat efektivitas Kelompok Tani
- 2) Menganalisis tingkat produktivitas padi pada Kelompok Tani
- 3) Menganalisis hubungan antara efektivitas kelompok tani secara simultan dan parsial dengan produktivitas padi

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan menjadi wujud implementasi pembelajaran yang dilakukan selama melaksanakan studi di perguruan tinggi
- 2) Bagi Petani, sebagai acuan untuk meningkatkan efektivitas kelompok tani dan kelancaran usahatani yang dijalankan.
- 3) Bagi Pemerintah, sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pertanian. Khususnya dalam kebijakan terkait dengan pembangunan kelompok tani. Agar kelompok tani memberikan peran maksimal terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di masa yang akan datang.

- 4) Bagi Peneliti lain, sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai hubungan efektivitas kelompok tani dengan produktivitas padi